

**TAHUN
2024**

RENCANA KERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merupakan ikhtisar Rencana Kerja yang akan dicapai selama Tahun 2024. Rencana Kerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar pedoman dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 ini mampu dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 ini dapat dijadikan arah di dalam melaksanakan seluruh Program/Kegiatan serta mampu memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Jambi, Agustus 2023

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002



DAFTAR TABEL

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2022	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 dan Capaian Prioritas RENSTRA DLH Prov. Jambi Tahun 2023	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	68
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	72
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	74
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	92
III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	93
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	93
3.2. Tujuan dan Sasaran	98
3.3. Program dan Kegiatan	102
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	124
V PENUTUP	135



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD DLH TA 2022.....	9
Tabel 2	Anggaran Pendapatan Dan Belanja DLH TA 2022	15
Tabel 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD dan Pencapaian RENSTRA DLH Provinsi Jambi s/d Tahun 2023	48
Tabel 4	Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	69
Tabel 5	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup ProvinsiJambi Tahun 2021-2026	69
Tabel 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Jambi	76
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023	100
Tabel 8	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 beserta Proyeksi Maju Tahun 2025 Provinsi Jambi	104
Tabel 9	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RENJA PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). RENJA SKPD memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jambi serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atau disebut DLH Provinsi Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Serta dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 28

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi memiliki tugas sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, perlu merumuskan dan menyusun Rencana Kerja SKPD guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang berbasis pada pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Renja SKPD sebagaimana dimaksud merupakan hasil Musrenbang Provinsi Jambi, serta hasil pembahasan usulan program dan kegiatan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang disinergikan dengan mengacu pada program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan merupakan kebijakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja DLH Provinsi Jambi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat tentang pengertian singkat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2022

Bab II memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2022 dan capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2023 serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Jambi.

C. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab III memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024.

D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab IV memuat program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

E. BAB V PENUTUP

Bab V memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN PRIORITAS RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2022

Dana APBD adalah sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp13.763.697.502,-
Belanja Pegawai	Rp13.763.697.502,-
b. Belanja Langsung	Rp10.454.780.105,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp8.904.527.955,-
Belanja Modal	Rp1.550.252.150,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp20.275.595.626,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp24.218.477.607,-. Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.942.881.981 untuk :

- Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.414.312.006,-
- Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 Medis untuk bantuan alat insenerator dari KLHK RI sebesar Rp 1.938.000.000, berupa :
 - ✓ Penyusunan Amdal
 - ✓ *Land clearing* (1,6 Ha) dan pengerasan akses jalan masuk
 - ✓ Jaringan listrik
 - ✓ Pagar pembatas
 - ✓ Pembuatan sumur bor dan perlengkapan
- Program Batanghari Bersih dan Kampung Mantap pada Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional sebesar Rp590.569.975,-.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp22.114.623.423,- (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau 91,31% dengan sisa dana sebesar Rp2.103.854.184,- (dua milyar seratus tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Rincian realisasi sbb :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp13.391.175.167,-
Belanja Pegawai	Rp13.391.175.167,-
b. Belanja Langsung	Rp8.723.448.256,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.586.307.456,-
Belanja Modal	Rp1.137.140.800,-

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp13.763.697.502,- realisasi sebesar Rp13.391.175.167,- (97,29%) dan Belanja Langsung sebesar Rp10.454.780.105,- untuk mendanai 8 Program (1 program rutin dan 7 program urusan LH), 16 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 34 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 14 subkegiatan urusan LH) realisasi Rp8.723.448.256,- (83,44%). Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			Rp.	% Keu	% Fisik	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.466.182.253	16.598.865.622	95,03	97,25	867.316.631
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.749.400	652.641.399	93,00	94,12	49.108.001
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.123.800	83.737.300	99,54	100,00	386.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.525.600	5.525.600	100,00	100,00	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	7.100.000	100,00	100,00	0
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	602.000.000	553.278.499	91,91	91,91	48.721.501
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	372.522.335
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	372.522.335
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	0
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	0
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.560.571	355.323.594	96,15	100,00	14.236.977
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.520	14.997.520	100,00	100,00	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.729.120	82.574.660	99,81	100,00	154.460

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.050.000	36.020.000	99,92	100,00	30.000
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.371.331	53.371.331	100,00	100,00	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.412.600	160.360.083	91,94	100,00	14.052.517
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.550.252.150	1.137.140.800	73,35	86,67	413.111.350
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.252.150	307.844.250	84,98	90,00	54.407.900
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.000.000	829.296.550	69,81	85,00	358.703.450
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	607.650.230	603.771.462	99,36	100,00	3.878.768
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.758.030	255.955.987	98,54	100,00	3.802.043
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.892.200	344.815.475	99,98	100,00	76.725
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.412.400	448.953.200	74,41	100,00	14.459.200
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.204.800	149.855.400	99,77	100,00	349.400
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.910.000	235.820.000	94,36	100,00	14.090.000
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.297.600	63.277.800	99,97	100,00	19.800
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	82.297.571

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran
II.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	82.297.571
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	82.297.571
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.540.000.030	1.476.163.249	95,85	95,85	63.836.781
III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1.290.000.030	1.237.377.401	95,92	95,92	52.622.629
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	230.000.030	209.986.388	91,30	100,00	20.013.642
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.060.000.000	1.027.391.013	96,92	100,00	32.608.987
III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	238.785.848	95,51	95,51	11.214.152
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	40.000.000	31.922.600	79,81	100,00	8.077.400
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	210.000.000	206.863.248	98,51	100,00	3.136.752
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	2.105.652
IV.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	2.105.652

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	2.105.652
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	710.681.223
V.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	710.681.223
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	855.665.616	158.051.286	18,47	86,96	697.614.330
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	21.492.462	17.682.940	82,28	100,00	3.809.522
3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	150.280.895	144.638.771	96,25	73,91	5.642.124
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	52.656.650	49.041.403	93,13	100,00	3.615.247
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),	2.238.000.000	1.899.556.906	84,88	100,00	338.443.094

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran
	KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
VI.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	93.154.976
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	93.154.976
VI.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	245.288.118
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	245.288.118
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	23.461.707
VIII.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	23.461.707
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	166.111.701	143.628.393	86,46	100,00	22.483.308

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	189.000.000	188.021.601	99,48	100,00	978.399
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	15.711.525
IX.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	15.711.525
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	15.711.525
	TOTAL	24.218.477.607	22.114.623.423	91,31	95,83	2.103.854.184

Sumber : LPPK DLH Provinsi Jambi, 2022

Serapan anggaran dari 35 subkegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 bervariasi satu sama lainnya, hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan berbeda-beda. Selain mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi juga menghasilkan dana pendapatan sebagai Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari jasa analisa sampel Laboratorium DLH Provinsi Jambi. Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp3.217.807.560,- (107,26%). Realisasi tahun 2022 ini sudah melebihi target, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang penerimaannya sebesar Rp3.326.308.866,-.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DLH Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
A	Pendapatan	3.000.000.000	3.217.807.560	107,26
B	Belanja	24.218.477.607	22.114.623.423	91,31
	1. Belanja tidak Langsung	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29
	2. Belanja Langsung	10.454.780.105	8.723.448.256	83,44
C	Surplus / (Defisit)	(27.218.477.607)	(24.851.488.983)	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, 2022

Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

PROGRAM NON URUSAN

Program non urusan (rutin) terdiri dari 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini dijabarkan menjadi 16 kegiatan dan 21 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan). Total anggaran untuk 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah ini sebesar Rp17.466.182.253,- dan terealisasi sebesar Rp16.598.865.622,- (95,03%). Sebagian besar output kegiatan telah dilaksanakan hampir 100% (97,25%).

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat yaitu :

1. Terdapat perubahan kebijakan dalam penganggaran misal perubahan standar harga
2. Banyaknya jumlah pegawai yang mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan kenaikan tunjangan fungsional menyebabkan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan kurang.
3. Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar sementara anggaran untuk ikut serta diklat terbatas.

4. Kegiatan ada yang pelaksanaannya terlambat bahkan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan ketidaksesuaian anggaran dengan spesifikasi pengadaan barang/jasa.

Solusi untuk permasalahan di atas adalah :

1. Penyesuaian anggaran dengan perubahan kebijakan
2. Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran.
3. Peningkatan anggaran diklat untuk tahun berikutnya.
4. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam kerangka acuan kerja yang baru dalam APBD Pergeseran.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prediaht/Nilai SAKIP		B (62,5)	B (69,95)	17.466.182.253	16.598.865.622		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	laporan/ dokumen	17	16	701.749.400	652.641.399		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	84.123.800	83.737.300	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	2	2	3.000.000	3.000.000	Terdapat perubahan kebijakan dalam penganggaran misal perubahan standar harga	Penyesuaian anggaran dengan perubahan kebijakan
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	2	2	5.525.600	5.525.600	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	7	7	7.100.000	7.100.000	-	-
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	0	602.000.000	553.278.499	Jadwal pelaksanaan Monev Kegiatan BioCF tidak sesuai dengan anggaran kas karena menunggu selesaiannya pelaksanaan survey lokasi serta akses jalan menuju desa lokasi kesulitan mendapatkan BBM	Mempercepat pembentukan dan penurunan tim untuk melaksanakan monev kegiatan BioCF setelah survey lokasi dilaksanakan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/ dokumen	34	34	13.763.697.502	13.391.175.167		

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	101	101	13.763.697.502	13.391.175.167	Adanya peraturan terkait kenaikan tunjangan fungsional	Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran gaji dan tunjangan pada APBD Perubahan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	28	28	9.860.000	9.860.000		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	28	28	9.860.000	9.860.000	Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar	Pergeseran anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek berbayar
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	369.560.571	355.323.594		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	4	14.997.520	14.997.520	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2	82.729.120	82.574.660	-	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	850	850	36.050.000	36.020.000	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	53.371.331	53.371.331	-	-
5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	8.000.000	8.000.000	-	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	26	21	174.412.600	160.360.083	Beberapa acara rakor dan konsultasi tidak dapat diikuti secara langsung	Mengikuti acara rapat atau undangan secara virtual (<i>via zoom meeting</i>)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	15	13	1.550.252.150	1.137.140.800		

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	10	9	362.252.150	307.844.250	Anggaran pengadaan mesin tidak sesuai untuk spesifikasi alat secara lengkap	Pengajuan anggaran pada APBD P tahun berikutnya
2	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	5	4	1.188.000.000	829.296.550	Pengajuan permintaan survey jaringan/ instalasi listrik oleh Dinas LH Provinsi Jambi terlambat ditindaklanjuti oleh PLN Kab. Bungo	Pengajuan anggaran pada APBD P tahun berikutnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	348	348	607.650.230	603.771.462		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	300	300	3.000.000	3.000.000	-	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	36	36	259.758.030	255.955.987	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	344.892.200	344.815.475	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	103	103	463.412.400	448.953.200		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	150.204.800	149.855.400	-	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	82	82	249.910.000	235.820.000	Peralatan dan mesin yang rusak tidak dapat diperbaiki	Memasukkan peralatan dan mesin yang tidak bisa diperbaiki ke dalam kelompok aset rusak dan menganggarkan pengadaannya pada tahun berikutnya

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	63.297.600	63.277.800	-	-

PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 7 program. Capaian kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Salah satu subkegiatan yang mendukung program ini pada tahun 2022 adalah subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi dengan anggaran Rp735.000.000,- dan terealisasi Rp652.702.429,- (88,80%). Output yang dicapai dari subkegiatan ini adalah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan DIKPLH Provinsi Jambi Tahun 2021. Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban untuk penyusunan DIKPLHD.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan	%	100	100	735.000.000	652.702.429		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	dokumen	2	2	735.000.000	652.702.429		
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	dokumen	2	2	735.000.000	652.702.429	1. Perubahan jadwal penandatanganan MoU kerjasama (swakelola) dengan pihak eksternal (IPB) dalam penyusunan dokumen RPPLH Provinsi Jambi 2. Keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban dalam penyusunan DIKPLHD	Kedua belah pihak DLH dan pihak eksternal) tetap berkomitmen terhadap MoU kerjasama yang telah disepakati

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp1.540.000.030,- dan terealisasi sebesar Rp1.476.163.249,- atau sebesar 95,85%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2022, yang didukung oleh beberapa kegiatan. Nilai IKA dan IKU ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jambi maupun SKPD terkait dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan Provinsi Jambi selama 5 tahun mendatang.

Sub kegiatan – sub kegiatan yang mendukung program ini, antara lain :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (12 titik), pemantauan terhadap kualitas air sungai Pengabuan sebanyak 2 kali di Kab. Tanjung Jabung Barat (3 titik) dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial).

2. Kegiatan pendayagunaan laboratorium lingkungan UPTD LABLING Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel, lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 3.624 sampel. Sedangkan, target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp3.217.807.560,- (107,26%). Realisasi tahun 2022 ini sudah melebihi target, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang penerimaannya sebesar Rp3.326.308.866,-.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi

- Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 8 kab/kota, yaitu Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim.

Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi pelaksanaan koordinasi / inventarisasi eksisting LAT dan Mangrove. Kategori kawasan yang diinventarisasi ada 2, yaitu : Mangrove (Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim), dan Lahan Akses Terbuka (Kab. Tanjabbar, Kab. Tanjabtim, Kab. Muaro Jambi, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Kerinci), semua daerah tambang yang tidak dilakukan reklamasi). Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	IKLH = 64,09 (IKU 84,42; IKA 61,19; IKAL 77,19; IKEG 73,89)	IKU 89,85; IKA 50,67; IKAL 81,67	1.540.000.030	1.476.163.249		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik	24	24	1.290.000.030	1.237.377.401		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	12	12	230.000.030	209.986.388	-	-
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu	laporan/ bulan	225 (2700 laporan/ tahun)	3452 laporan/ tahun	1.060.000.000	1.027.391.013	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
		yang dilaksanakan							
		Besaran Target PAD per tahun		Rp3.000.000 .000	Rp2.736.865. 560				
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	8	9	250.000.000	238.785.848		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	2	2	40.000.000	31.922.600	Tidak tersedianya data yang diminta ke kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar	1.) Melaksanakan sosialisasi pengendalian karhutla terhadap masyarakat dan usaha/ kegiatan. 2.) Melakukan follow up terkait ketersediaan data
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	dokumen	5	5	210.000.000	206.863.248	Tidak dilakukannya reklamasi pasca tambang dari kegiatan pertambangan dan galian C.	Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dan usaha/ kegiatan.

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Jumlah dunia usaha/ kegiatan yang dibina terkait pengelolaan B3 dan LB3 sebanyak 6 perusahaan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalinya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Jumlah koordinasi/ pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab/kota sebanyak 5 kab./kota.

Koordinasi/pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab./kota dilaksanakan di 5 kab./kota, yaitu : Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, dan Kab. Batanghari.

3. Jumlah pelaksanaan pemantauan perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 sebanyak 534 (data aplikasi Siraja Limbah)

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3	%	80	100	140.000.000	137.894.348		
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	perusahaan	4	6	140.000.000	137.894.348		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	5	5	140.000.000	137.894.348	-	-

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi lisensi KPA
Target tahun 2022, binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi KPA sebanyak 4 kab/kota dan terealisasi sebanyak 4 kab/kota (3 UKL-UPL dan 1 KPA).
2. Fasilitasi persetujuan pemerintah 4 dokumen
3. Pembinaan dan pemantauan izin lingkungan / RKL-RPL perusahaan se-Provinsi Jambi
4. Penyusunan Amdal untuk bantuan insenerator dari Kementerian LHK tidak terlaksana.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah

1. Penilaian dokumen Amdal dari PP 27/2012 ke PP 22/2021 masih dalam proses penyempurnaan petunjuk teknis (KPA ke Tim Uji Kelayakan)
2. Waktu penilaian Amdal tidak mencukupi karena keterlambatan pengesahan Perubahan APBD
3. KLHK belum memberikan jadwal untuk penilaian dokumen Amdal karena banyaknya permintaan pembahasan Amdal di KLHK.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah

1. Percepatan penyesuaian dengan terbitnya regulasi yang memunculkan Perstek baru.
2. Pembuatan dokumen lingkungan (Dokumen Evaluasi LH)

➤ Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi bimbingan teknis pengembangan kapasitas dan kompetensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi sebanyak 1 kali. Jumlah fungsional PPLH yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi saat ini sebanyak 12 orang.

➤ Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunnya beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Uraian	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	53	17	19	19
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-	9	2	1
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-	9	5	17

Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan tahun 2022 sebanyak 19 usaha/kegiatan dari target 23 usaha/kegiatan.

➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	45,45% (5 perusahaan)		1.027.438.973	369.414.400		
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	perusahaan	11		1.027.438.973	369.414.400		
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	dokumen	23	27	855.665.616	158.051.286	1. Penilaian dokumen Amdal dari PP 27/2012 ke PP 22/2021 masih dalam proses penyempurnaan petunjuk teknis (KPA ke Tim Uji Kelayakan) 2. Waktu penilaian Amdal tidak mencukupi karena keterlambatan pengesahan Perubahan APBD 3. KLHK belum memberikan jadwal untuk	1. Percepatan penyesuaian dengan terbitnya regulasi yang memunculkan Perstek baru. 2. Pembuatan dokumen lingkungan (Dokumen Evaluasi LH)

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

								penilaian dokumen Amdal karena banyaknya permintaan pembahasan Amdal di KLHK	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	12	12	21.492.462	17.682.940	-	-
3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	dokumen	23	17	150.280.895	144.638.771	Kurangnya komitmen dunia usaha terhadap izin lingkungan yang diberikan	Memberikan sanksi yang sesuai kepada kegiatan usaha yang terbukti lalai dalam mentaati izin lingkungan
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dokumen	9	9	52.656.650	49.041.403	Perbedaan pemahaman PPLH terhadap peraturan perundang-undangan	Penguatan kompetensi PPLH

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah

- Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi :
 - i) penyusunan draft naskah akademik dan draft Perda pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) : 1 kali
 - ii) penyusunan laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali
 - iii) pelaksanaan lokakarya kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali

Pada tahun 2022 target inventarisasi keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terealisasi 11 MHA, dan pada tahun 2023 akan diajukan pengakuan MHA tersebut dalam Perda. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesalahan dalam beberapa rincian anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi : pelaksanaan FPIC BSM di 30 lokasi, pelaksanaan FPIC lanjutan di 30 lokasi, pelaksanaan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sebanyak 2 kali, pelaksanaan pelatihan ESMF sebanyak 2 kali. Sementara itu pelaksanaan SESA/ESMF (kick off) sebanyak 1 kali tidak terlaksana. Pelaksanaan workshop/sosialisasi pengantar SESA/ESMF tidak terlaksana karena penuhnya jadwal narasumber dari KLHK.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%	100	100	2.238.000.000	1.899.556.906		
	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	MHA	30	30	500.000.000	406.845.024		
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	dokumen	30	30	500.000.000	406.845.024	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	Kelembagaan	30	30	1.738.000.000	1.492.711.882		
1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	dokumen	7	6	1.738.000.000	1.492.711.882	Pelaksanaan workshop/sosialisasi pengantar SESA/ESMF tidak terlaksana karena penuhnya jadwal narasumber dari KLHK	workshop/ sosialisasi SESA akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan anggaran dari KLHK

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2022 sebanyak 24 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 9 kasus.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2022 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 24 usaha/kegiatan. Realisasi kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	100	100	355.111.701	331.649.994		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	kasus	18	24	355.111.701	331.649.994		
		Terlaksananya penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup	kasus	18	24				
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	dokumen	18	24	166.111.701	143.628.393	1.) Masyarakat belum begitu memahami SOP pengaduan lingkungan, 2.) Budaya masyarakat yang merasa khawatir akan kerahasiaan identitas pengadu.	1.) Dinas LH akan kerjasama dengan diskominfo terkait aplikasi satu pintu yang dikembangkan yaitu SP4N Lapor, serta pembuatan dan penyebaran pamflet terkait SOP dan hotline pengaduan lingkungan, 2.) Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengaduan lingkungan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	18	24	189.000.000	188.021.601	1.) Rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan tidak sesuai dengan jadwal 2.) Adanya kasus yang tidak bisa langsung ditangani ke tingkat penyidikan	1.) Mempercepat persiapan bahan rapat tindak lanjut hasil pengawasan 2.) Pengajuan usulan untuk mengisi jabatan fungsional PPNS ke BKD
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----	-------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g. Program Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 7 kab/kota : Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jamb, dan Kota Jambi.
2. Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R) di Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kota Jambi.
3. Pelaksanaan pencanangan (MoU) Batanghari Bersih dengan 11 Kab/kota.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan penilaian Kampung Mantap LH sebagai salah satu wujud pencanangan program Batanghari Bersih. Sosialisasi Kampung Mantap oleh Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jambi di 11 desa di 11 Kab/Kota. Sementara penilaian Kampung Mantap LH oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan terhadap 22 desa di 11 Kab/Kota, dimana 11 desa merupakan hasil pembinaan Provinsi dan 11 desa merupakan hasil pembinaan Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan studi komparasi pengelolaan limbah dan persampahan ke Provinsi Sumatera Barat.

Target Jakstrada Provinsi Jambi untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2022 sebesar 26%, sedangkan target untuk penanganannya sebesar 72%. Sementara itu, realisasi pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2022 sebesar 22%, sedangkan realisasi untuk penanganannya sebesar 68,67%.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	26		664.088.000	648.376.475		
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan pengurangan sampah secara regional	ton/ tahun	183,738,86		664.088.000	648.376.475		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	dokumen	8	8	664.088.000	648.376.475	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan sampah (tahap pemilahan di sumbernya)	Sosialisasi tentang pengelolaan persampahan dan pembentukan bank sampah di setiap desa atau kecamatan dengan membentuk "Kampung Mantap"

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feedback* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) terlaksana sebesar 75,91%, dengan realisasi anggaran sebesar 18,47% dan kinerja 86,96% pada subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. Hal ini dikarenakan belum selesainya proses penyusunan dokumen Amdal untuk pembangunan fasilitas pelayanan limbah B3 medis di Kabupaten Bungo.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana sebesar 97,25%.
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup baru terlaksana sebesar 100%
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksana sebesar 95,85%.
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) belum terlaksana 100%.
 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terlaksana sebesar 100%.

- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup terlaksana sebesar 97,63%.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp3.217.807.560,- (107,26%). Realisasi tahun 2022 ini sudah melebihi target, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang penerimaannya sebesar Rp3.326.308.866,-. Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel, lebih tinggi dari target 2700 sampel (225 sampel/bulan).

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
 - ❖ Keterlambatan keluarnya pengesahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
 - ❖ Adanya perubahan-perubahan aturan terkait lingkungan hidup
- Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
 - ❖ Komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup DLH Provinsi Jambi untuk merealisasikan target output dan outcomes dengan dukungan anggaran.
 - ❖ Terlaksananya evaluasi dan pengendalian kegiatan dari pimpinan kepada bawahan lingkup DLH Provinsi Jambi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, antara lain :

- Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Penambahan anggaran pada perubahan menyebabkan waktu untuk melaksanakan program/kegiatan tidak cukup mengakibatkan target capaian kinerja program dan kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan awal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua komponen di Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.
- Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM agar lebih kompeten sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian output dan outcomes.
- Atasan langsung memantau/memonitor perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya dengan membuat agenda kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Adapun secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja 2022 dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2023 tertuang dalam Tabel 3.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

TABEL 3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI S/D TAHUN 2023

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (65)	B (65)	B (69,25)	B (63)	B (69,95)	111%	B (63,5)	B (69,95)	100%
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokume n Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	123	laporan / dokumen	12	17	16	100%	24	77	63%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	dokumen	2	4	4	100%	4	14	70%
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15	dokumen	1	1	1	100%	3	8	53%
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15	dokumen	1	1	1	100%	3	8	53%
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15	dokumen	1	1	1	100%	3	8	53%
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15	dokumen	1	1	1	100%	3	8	53%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	laporan	5	7	7	100%	6	24	80%
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	laporan	1	2	1	100%	2	7	70%
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	175	laporan/dokumen	29	34	34	100%	35	133	76%
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	120	orang/bulan	14	101 orang (14 bulan)	101 orang (14 bulan)	100%	103 orang/bulan (14 laporan)	115 orang (56 bulan)	47%
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	laporan	1	1	1	100%	2	6	60%
2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	25	dokumen	0	5	5	100%	5	15	60%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	70	laporan	14	14	14	100%	14	56	80%
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	305	orang	60	28	28	100%	88	279	91%
2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1680	paket	0	0	0	0	0	175	10%
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19	orang	0	2	2	100%	0	6	32%
2.11.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	175	orang	60	26	26	100%	30	151	86%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	310	orang	0	0	0	0	58	123	40%
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	paket	4	4	4	100%	6	24	48%
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	195	paket	2	2	2	100%	2	46	24%
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4800	paket	800	850	850	100%	700	3350	70%
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60	paket	12	12	12	100%	12	48	80%
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dokumen	12	12	12	100%	12	48	80%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	950	laporan	20	26	26	100%	200	446	47%
2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16	laporan	2	2	2	100%	2	9	56%
2.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	dokumen	1	1	1	100%	1	5	56%
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	132	unit	4	15	13	87%	0	44	33%
2.11.01.1.07.01	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	11	unit	0	0	0	0	0	3	27%
2.11.01.1.07.05	Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	95	unit	0	0	0	0	0	19	20%
2.11.01.1.07.06	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	unit	4	10	9	90%	0	17	85%
2.11.01.1.07.09	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6	unit	0	5	4	80%	0	5	83%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1490	laporan	398	348	348	100%	348	1392	93%
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1250	laporan	350	300	300	100%	300	1200	96%
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	180	laporan	36	36	36	100%	36	144	80%
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	laporan	12	12	12	100%	12	48	80%
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	136	unit	102	103	103	100%	103	120	88%
2.11.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	unit	23	0	0	0%	0	21	91%
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	7	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	100%	16	9	100%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92	unit	70	82	82	100%	82	88	96%
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	unit	2	2	2	100%	5	11	92%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100	%	3	3	3	100%	100%	100%	100%
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	11	dokumen	0	2	2	100%	0	4	36%
2.11.01.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	2	kali dokumen dokumen	0	2	2	100%	0	2	100%
2.11.01.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	8	dokumen	0	0	0	0%	0	2	25%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	24	dokumen	3	1	1	100%	2	10	42%
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	5	dokumen	1	0	0	0	0	1	20%
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1	dokumen	1	1	1	100%	2	3	3
2.11.02.1.02.03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Jambi yang disusun	1	dokumen	0	0	0	0	0	1 dokumen (Peninjauan Kembali)	1
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	17	dokumen	1	0	0	0%	0	5	29%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA : 61,59	poin	IKA : 48,96	IKA : 61,19	IKA : 49,49	IKA : 80,88%	IKA : 61,19	IKA : 61,29	IKA : 49,49
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU : 84,82	poin	IKU : 87,08	IKU : 84,42	IKU : 89,85	IKU : 106,43%	IKU : 84,42	IKU : 84,52	IKU : 89,85
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	IKAL : 63,11	poin					IKAL : 56,32	IKAL : 77,84	
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKEG : 75,89	poin					IKEG : 73,89	IKEG : 74,39	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94	titik	24	30	30	100%	30	94	100%
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	60	dokumen	12	12	12	100%	12	48	80%
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	30	dokumen	0	0	0	0%	0	6	20%
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	25200	laporan (420)	3624	2700	3452	128%	225 laporan/bulan	360 laporan/bulan	86%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.03.1.02	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10	lokasi	9	9	9	100%	10	10	100%
2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	60	dokumen	5	4	4	100%	12	33	55%
2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	22	dokumen	4	5	5	100%	4	17	77%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	100	%	0	0	0	0	0%	100%	100%
2.11.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	5	dokumen (Perda/ Pergub)	0	0	0	0	0	1 dokumen (Perda/ Pergub)	20%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	5	dokumen	0	0	0	0	0	1	20%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/ kota yang terinventarisasi	6	perusahaan	5	5	6	100%	5	6	100%
2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	dokumen	0	0	0	0	0	1	20%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22	dokumen	5 dokumen	5	5	100%	22	22	100%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	86% (60 perusahaan)	% (perusahaan)	-	74%	89%	89%	76%	77% (54 perusahaan)	88%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70	perusahaan	17	23	19	83%	25	25	36%
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	100	dokumen	11	23	17	100%	25	73	73%
2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	15	orang	0	12	12	100%	12	12	80%
2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80	usaha	17	23	19	83%	25	25	31%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	55	dokumen	0	9	9	100%	25	45	82%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	100	%	0	71,42	36,67	51%	71,42%	86%	79%
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	42	MHA	0	30	11	37%	33	33	79%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	55	dokumen	11	11	11	100%	11	44	80%
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	42	kelembagaan	0	30	11	37%	33	33	79%
2.11.07.1.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	42	dokumen	0	7	7	100%	33	33	79%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	80	%	0	0	0	0	60%	70%	70%
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	5	kali	0	0	0	0	4	4	80%
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	154	dokumen	0	0	0	0	4	22	14%
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	525	orang	0	0	0	0	0	100	19%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100	%	0	0	0	0	0	100%	100%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6	kategori	0	0	0	0	0	6	100%
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6	entitas	0	0	0	0	0	6	100%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100	%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	19	kasus	9	18	24	100%	18	24	100%
		Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	28	kasus	0	18	24	100%	18	24	100%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	85	dokumen	9	18	24	100%	18	68	80%
2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	182	dokumen	9	18	24	100%	18	88	48%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	30	%	18,50%	26	-	-	27%	28%	90%
		Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	70	%	-	72	-	-	72%	71%	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	224.982,86	ton/tahun	-	183.738,86	-	-	194.621,85	205.866,67	87%
		Jumlah penanganan sampah secara regional	524.960,00	ton/tahun	-	8	-	-	518.991,60	522.019,05	99%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	65	dokumen	11	8	8	100%	5	37	57%
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	3	unit	-	0	0	0	0	1	33%
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	8	dokumen	-	0	0	0	0	2	25%
2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	524.960,00	ton/tahun	-	0	0	0	0	522.019,05	99%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pada misi 2, yaitu **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai misi ke-5 RPJMD Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah terwujudnya sumber lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas udara, air, air laut, dan ekosistem gambut
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) RPJMN 2020-2024 terdiri dari 5 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Target setiap komponen terdiri atas :

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 84,1 – 84,5
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Air 55,1 – 55,5
- c. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan 61,6 – 65,5
- d. Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut 58,5 – 60,5

Berdasarkan rincian komponen tersebut ditetapkan target IKLH 2020-2024 yaitu 68,71-69,74.

Tabel 4
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI														
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	71,7	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53	69,04	70,32	-	72,8	73,17	Pengukuran IKK Urusan LH sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten X 100% Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	61%	70%	76%	77%	79%	86%	61%	68,42%	-	77%	79%	Pengukuran IKK Urusan LH sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA														
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EV} - 0,1) \right)$	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82	87,08	89,85	-	84,62	84,72	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_R}{2}}$	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59	48,96	49,49	-	61,39	61,49	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$	54,62	56,32	58,02	59,71	61,41	63,11	83,58	81,67	-	59,71	61,41	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKEG = (0,6 x IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut) + (0,4 x IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut)	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89	71,1	71,1	-	74,89	75,39	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

5	Nilai SAKIP			62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)	69,25 (B)	69,95 (B)	78.75 (BB)	64 (B)	64,5 (B)	IKU TAMBAHAN
6	IKM			83	83,25	83,50	83,75	84	84,25	84,03	84,55	84,55	83,75	84	

Sumber : Laporan Monev Kinerja, 2022

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beban lingkungan di wilayah Provinsi Jambi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan ini disebabkan beberapa isu lingkungan hidup strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi antara lain :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbunan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal
4. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.

Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang masing-masing lembaga dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada harus mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RKPD Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2023 lebih dititikberatkan pada pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH dan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS Tata Ruang.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan

- sampah Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
 6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Selain itu, rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, subkegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Usulan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja DLH Provinsi Jambi senantiasa diselaraskan dengan Renstra DLH Provinsi Jambi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan terdapat perbedaan yang signifikan pada program kegiatan serta target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi OPD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

TABEL 6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI JAMBI

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64)	21.262.250.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64)	21.262.250.000	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	25 laporan/ dokumen	1.208.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	25 laporan/ dokumen	1.208.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	435.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	435.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	661.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	661.000.000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan/ dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/ dokumen	16.018.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/ dokumen	16.018.000.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 orang/ bulan	16.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	16.000.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14 laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	8.000.000	
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	279 orang	145.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian	175 orang	145.250.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Jambi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	175 paket	113.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	175 Paket	113.750.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jambi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	16.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16.500.000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	35 orang	5.250.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	5.250.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	65 orang	9.750.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	9.750.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.039.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.039.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	200.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1000 paket	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	75.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Jambi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	65.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	450.000.000	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 laporan	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	25.000.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000	
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	27 unit	995.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	27 unit	995.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	360.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	360.000.000	
2	Kegiatan Pengadaan Mebel	Provinsi Jambi	Jumlah unit mebel yang disediakan	19 unit	300.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	300.000.000	
3	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	35.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.000.000	
4	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	300.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	703.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	703.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	250 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	3.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	400.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	120 unit	1.154.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	120 unit	1.154.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	500.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	500.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	88 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	70.000.000,00	
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	84.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	84.000.000,00	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	3.900.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	3.900.000.000	
II.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	2 dokumen	750.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi yang disusun	2 dokumen	750.000.000	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	-	0	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	0 Dokuman	0	
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	2 dokumen	750.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen	750.000.000	
II.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	7 dokumen	3.150.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	7 dokumen	3.150.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

1	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000	
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 dokumen	1.000.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	
3	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen (Peninjauan Kembali)	400.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 Dokumen	400.000.000	
4	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen KLHS KRP provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	4 dokumen	1.250.000.000	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	4 Dokumen	1.250.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKU : 84,62 IKA : 61,39 IKAL : 78,49 IKEG : 74,89	4.738.236.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKU : 84,62 IKA : 61,39 IKAL : 78,49 IKEG : 74,89	4.738.236.000	
III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	4.255.236.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	4.255.236.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12 dokumen	655.236.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12 Dokumen	655.236.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	700.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	700.000.000	
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	360 laporan/ bulan	2.900.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	360 Dokumen	2.900.000.000	
III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	483.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	483.000.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	12 dokumen	278.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	12 Dokumen	278.000.000,00	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	4 dokumen	205.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	4 Kegiatan	205.000.000,00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi.	100%	450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	100%	450.000.000	
IV.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen (Perda/ Pergub)	450.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen	450.000.000,00	
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	450.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000,00	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	165.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	165.000.000	
V.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	5 perusahaan	165.000.000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	5 perusahaan	165.000.000,00	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Jambi	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 dokumen	165.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 Dokumen	165.000.000,00	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77% (54 perusahaan)	1.190.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77% (54 perusahaan)	990.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

VI.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/ kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 perusahaan	1.190.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/ kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 perusahaan	990.000.000,00	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	300.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	300.000.000,00	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	15 orang	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	100.000.000,00	
3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 laporan	590.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	590.000.000,00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11 dokumen	200.000.000					

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	86%	510.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	86%	510.000.000	
VII.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	36 MHA	250.000.000	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah lokus MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui di Provinsi Jambi	36 lokus	250.000.000	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 Dokumen	250.000.000	
VII.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	36 kelembagaan	360.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	36 kelembagaan	360.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	36 dokumen	360.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	36 Dokumen	360.000.000	BIOCF
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	70%	550.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	70%	550.000.000	
VIII.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	4 kali	550.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi	4 kali	550.000.000,00	
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	22 dokumen	450.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	22 Dokumen	450.000.000,00	
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	100 orang	100.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	100 Orang	100.000.000,00	
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100%	750.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100%	750.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

IX.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6 kategori	750.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6 kategori	750.000.000	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 entitas	750.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 Entitas	750.000.000	
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100%	1.150.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100%	1.350.000.000	
X.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	17 kasus	1.150.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	17 kasus	1.350.000.000	
			Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	23 kasus			Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	23 kasus		
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	17 dokumen	400.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	17 Pengaduan	400.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	37 dokumen	750.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	22 Perkara	350.000.000	
						Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	20 Perkara	400.000.000	
						Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	6 Perkara	200.000.000	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	28%	400.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	28%	400.000.000	
			Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	71%			Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	71%		
XI.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah pengurangan sampah secara regional	205.866,67 ton/ tahun	400.000.000	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	205.866,67 ton/tahun	400.000.000	
			Jumlah penanganan sampah secara regional	522.019,05 ton/ tahun			Jumlah penanganan sampah secara regional	522.019,05 ton/tahun		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	13 dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	13 Dokumen	200.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

2	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah fasilitasi TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 unit	0	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	0	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	2 dokumen	100.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	2 Unit	100.000.000	
4	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	522.019,05 ton/ tahun	100.000.000	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	522.019,05 Ton	100.000.000	
	TOTAL				35.165.486.000	TOTAL			35.165.486.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan lingkungan hidup sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum PD. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan dari Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Usulan kegiatan itu belum ada yang bisa diakomodir oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi karena ada yang bukan kewenangan dari Provinsi. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional bidang Lingkungan Hidup melalui Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjabarkan bahwa visi dan misi bidang Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2020-2024 adalah

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memiliki empat pilar agenda kerja yaitu:

- Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan)

- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi)
- Fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial)
- Tata Kelola dan Inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata Kelola).

Untuk pilar lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75 - 78 yang pada tahun sebelumnya (2018) berada di angka 71,67;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% pada tahun 2017;
- Penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018;
- Indeks Kinerja Pengelolaan sampah sebesar 80;
- Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap Ketahanan Pangan dan ketangguhan Bencana sebanyak 108 DAS serta rehabilitasi seluas 1,5 juta Ha;
- Perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pada pilar ekonomi termasuk pengembangan 15 kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional, sedangkan pada pilar tata kelola KLHK akan merencanakan memperkuat kualitas kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan diterapkan untuk diintegrasikan secara nyata dalam agenda kerja pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Selain itu sasaran tata kelola ditujukan untuk peningkatan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan, penyelesaian 263 kasus bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta peningkatan PNPB, selain itu integrasi satu sistem data dan informasi yang valid dan mudah untuk diakses. Pilar tata Kelola juga termasuk 100 produk hasil Litbang yang inovatif dan imlementatif, selain itu peningkatan nilai kinerja reformasi

birokrasi, tata kelola keuangan yang baik serta penguatan SDM aparatur KLHK.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah RKP tahun kelima dalam konteks rencana lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tema RKP 2024 yang diangkat oleh pemerintah adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema RKP Tahun 2024 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) arah kebijakan prioritas, yaitu 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, 4) penguatan daya saing, 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, 7) percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan 8) pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Delapan Prioritas Nasional ini harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan serta Proyek Prioritas, juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Sasaran pembangunan pada tahun 2024, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7 persen
2. Tingkat kemiskinan ditekan ke angka 6,5-7,5 persen
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5-5,7 persen
4. Rasio gini 0,375-0,377 poin
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110 poin

8. Nilai Tukar Petani 105-108 poin

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 yang terkait dengan KLHK adalah

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
3. Pembangunan rendah karbon

Dikaitkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Pembangunan SDM, sosial dan budaya
2. Pembangunan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informasi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Trantibum

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 4 (empat) yaitu **“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana”** dengan fokus pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (26,8% - 27,1%). Strategi pembangunan yang dilakukan terkait hal tersebut dengan meningkatkan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah **“Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Rencana penetapan tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 diterjemahkan ke dalam Prioritas-Prioritas Pembangunan Daerah yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan-kebijakan RKPD Provinsi Jambi

Tahun 2024 serta diimplementasikan ke dalam APBD Tahun 2024. Adapun yang menjadi isu strategis Provinsi Jambi tahun 2024 antara lain :

1. Ketimpangan antar wilayah da pendapatan
2. Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia
3. *Bottleneck* jalur logistik
4. Pemilu dan Pilkada Serentak

Isu strategis tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan melalui Prioritas RKPD Provinsi Jambi tahun 2024. Adapun yang menjadi Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2024 ini adalah :

1. Peningkatan produktivitas daerah
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Pembangunan infrastruktur daerah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Ketentraman dan ketertiban umum

Arah Kebijakan untuk Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024, antara lain :

- PP1 : Peningkatan Produktivitas Daerah
 - a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon;
 - b. Meningkatkan nilai tambah sector pariwisata melalui pengembangan industri kreatif;
 - c. Meningkatkan investasi daerah;
 - d. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan;
 - e. Penurunan tingkat pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak.
- PP2 : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Perluasan akses terhadap pendidikan;
 - b. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan gender;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.

- PP3 : Pembangunan Infrastruktur Daerah
 - a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar
 - b. Peningkatan layanan infrastruktur transportasi
 - c. Memperluas akses terhadap sanitasi layak
- PP4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana, penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforectasi;
 - b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya;
 - c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan;
 - d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- PP5 : Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Meningkatkan akuntabilitas;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c. Pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan visi Pemerintahan Provinsi Jambi periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP) 2024“, maka disusunlah misi pembangunan Provinsi Jambi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran, yaitu :

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan

yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Misi pembangunan yang selaras dengan urusan bidang Lingkungan Hidup adalah misi ke-2.

Tujuan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026 dan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- **Sasaran 1** “ Meningkatkan kualitas udara, air, air laut, dan ekosistem gambut”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

- **Sasaran 2** “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	70,87	71,70	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53
Pengelolaan ekonomi dan pariwisata daerah yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82
			2. Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59
			3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	poin	55,93	54,62	77,19	77,84	78,49	79,17	79,79
			4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5. Nilai AKIP	poin	61,59 (B)	62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) RPJMN 2020-2024 terdiri dari 5 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Target setiap komponen terdiri atas :

- Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 84,1 – 84,5
- Meningkatnya Indeks Kualitas Air 55,1 – 55,5
- Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan 61,6 – 65,5
- Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut 58,5 – 60,5

Berdasarkan rincian komponen tersebut ditetapkan target IKLH 2020-2024 yaitu 68,71-69,74.

Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu

- kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DPKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
 3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
 5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup perlu menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp13.763.697.502,- dan Belanja Langsung sebesar Rp10.454.780.105,- dengan target Pendapatan Asli Daerah Rp3.000.000.000,-.

Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk

melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan DLH Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2024
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Tahun 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi direncanakan akan melaksanakan sebanyak 11 (sebelas) program 20 (dua puluh) kegiatan 60 sub kegiatan, dengan rincian yaitu 1 (satu) program 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan merupakan non urusan, sedangkan 10 (tujuh) program 13 (tiga belas) kegiatan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan merupakan urusan bidang lingkungan hidup. Program prioritas ini dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jambi serta tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Rencana kerja (program/kegiatan) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 seperti tercantum dalam Tabel 8 berikut ini :

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

TABEL 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 BESERTA PROYEKSI MAJU TAHUN 2025
PROVINSI JAMBI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
		Dinas Lingkungan Hidup			35.165.486.000				35.658.786.000
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.165.486.000				35.658.786.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			35.165.486.000				35.658.786.000
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64) poin	21.262.250.000			B (64,5) poin	22.443.550.000
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	25 laporan/ dokumen	1.208.000.000			25 laporan/ dokumen	1.248.000.000
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	435.000.000	APBD		4 Dokumen	450.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD		3 Dokumen	3.000.000
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD		3 Dokumen	3.000.000
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD		3 Dokumen	3.000.000
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD		3 Dokumen	3.000.000
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	APBD		6 Laporan	125.000.000
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	661.000.000	APBD + BIOCF		3 Laporan	661.000.000
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/ dokumen	16.018.000.000			35 laporan/ dokumen	17.018.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	16.000.000.000			115 Orang/ Bulan	17.000.000.000
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000			2 Laporan	5.000.000
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5.000.000			5 Dokumen	5.000.000
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	8.000.000			14 Laporan	8.000.000
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian	175 orang	145.250.000			290 orang	150.050.000
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	175 Paket	113.750.000	APBD		175 Paket	113.750.000
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16.500.000	APBD		4 Orang	19.800.000
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	5.250.000	APBD		35 Orang	6.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	9.750.000	APBD		65 Orang	10.500.000
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.039.000.000			100 %	1.054.500.000
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.000.000	APBD		10 Paket	25.000.000
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	200.000.000	APBD		40 Paket	200.000.000
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	75.000.000	APBD		1000 Paket	80.000.000
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	65.000.000	APBD		12 Paket	65.000.000
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.000.000	APBD		12 Dokumen	4.500.000
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	450.000.000	APBD		200 Laporan	450.000.000
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	25.000.000	APBD		3 Dokumen	30.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	27 unit	995.000.000			25 unit	1.040.000.000
	2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	360.000.000	APBD		1 Unit	400.000.000
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	300.000.000	APBD		19 Paket	300.000.000
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.000.000	APBD		4 Unit	40.000.000
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	APBD		1 Unit	300.000.000
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	703.000.000			298 laporan	753.000.000
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	3.000.000	APBD		250 Laporan	3.000.000
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	400.000.000	APBD		36 Laporan	450.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	APBD		12 Laporan	300.000.000
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	120 unit	1.154.000.000			126 unit	1.180.000.000
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	500.000.000	APBD		21 Unit	500.000.000
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	500.000.000	APBD		9 Unit	500.000.000
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	70.000.000	APBD		88 Unit	75.000.000
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	84.000.000	APBD		2 Unit	105.000.000
2	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 Persen	3.900.000.000			100 Persen	2.000.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi yang disusun	2 dokumen	750.000.000			2 dokumen	750.000.000
	2.11.01.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	0 Dokuman	0,00	APBD		0 Dokuman	0
	2.11.01.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen	750.000.000	APBD		2 Dokumen	750.000.000
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	7 dokumen	3.150.000.000			7 dokumen	1.250.000.000
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	0,00
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 Dokuman	400.000.000	APBD		1 Dokuman	0,00
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	4 Dokumen	1.250.000.000	APBD		4 Dokumen	750.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	61.39 poin 84.62 poin 78,49 poin 74,89 poin	4.738.236.000			IKU : 84,72 IKA : 61,49 IKAL : 79,17 IKEG : 75,39	4.575.236.000
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	4.255.236.000			94 titik	4.055.236.000
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12 Dokumen	655.236.000	APBD		12 Dokumen	655.236.000
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	700.000.000	APBD		6 Dokumen	500.000.000
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	360 Dokumen	2.900.000.000	APBD		360 Dokumen	2.900.000.000
	2.11.03.1.02	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	483.000.000			10 lokasi	520.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	12 Dokumen	278.000.000	APBD		12 Dokumen	315.000.000
	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	4 Kegiatan	205.000.000	APBD		4 Kegiatan	205.000.000
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	100 Persen	450.000.000			100 Persen	500.000.000
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen	450.000.000			1 dokumen	500.000.000
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)	100 Persen	165.000.000			100 Persen	165.000.000
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	5 perusahaan	165.000.000			5 perusahaan	165.000.000
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	APBD		1 Dokumen	0,00

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya	22 Dokumen	165.000.000	APBD		22 Dokumen	165.000.000
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77 Persen	990.000.000			79% (55 perusahaan)	1.115.000.000
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 perusahaan	990.000.000			80 perusahaan	1.115.000.000
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	300.000.000	APBD		20 Dokumen	325.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	100.000.000	APBD		15 Orang	150.000.000
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	590.000.000	APBD		70 Badan Usaha	640.000.000
	2.11.06.1.01.04	SUBKEGIATAN HILANG, SEMENTARA DIPETAKAN DI SUBKEGIATAN PADA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP (2.11.10.1.01.0003)							
7	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	86 Persen	610.000.000			93%	610.000.000
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah lokus MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui di Provinsi Jambi	36 lokus	250.000.000			39 lokus	250.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 Dokumen	250.000.000	APBD + BIOCF		11 Dokumen	250.000.000
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	36 kelembagaan	360.000.000			39 kelembagaan	360.000.000
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	36 Dokumen	360.000.000	APBD + BIOCF		36 Dokumen	360.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

8	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	70 Persen	550.000.000			80 persen	600.000.000
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi	4 kali	550.000.000			4 kali	600.000.000
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	22 Dokumen	450.000.000	APBD		22 Dokumen	500.000.000
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	100.000.000
9	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase usulan penghargaan LH untuk masyarakat yang difasilitasi	100 Persen	750.000.000			100 Persen	850.000.000
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6 kategori	750.000.000			6 kategori	850.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 Entitas	750.000.000			6 Entitas	850.000.000
10	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif	100 Persen	1.350.000.000			100 Persen	1.600.000.000
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	17 kasus	1.350.000.000			18 kasus	1.600.000.000
			Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	23 kasus				25 kasus	
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	17 Pengaduan	400.000.000	APBD		17 Pengaduan	450.000.000
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	11 Perkara	200.000.000	APBD		22 Perkara	250.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	20 Perkara	450.000.000	APBD		20 Perkara	500.000.000
	2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	17 Perkara	300.000.000	APBD		6 Perkara	400.000.000
11	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	28%	400.000.000			28%	1.200.000.000
			Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	71%				71%	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	205.866,67 ton/tahun	400.000.000			205.866,67 ton/tahun	1.200.000.000
			Jumlah penanganan sampah secara regional	522.019,05 ton/tahun				522.019,05 ton/tahun	
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	13 Dokumen	200.000.000	APBD		13 Dokumen	600.000.000
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	0,00	APBD		1 Unit	400.000.000
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	2 Unit	100.000.000	APBD		2 Unit	100.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	522.019,05 Ton	100.000.000	APBD		522.019,05 Ton	100.000.000
	TOTAL				35.165.486.000				35.658.786.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

TAGGING KEGAITAN HIBAH JSMLP BOICF ISFL PROVINSI JAMBI

Nomor Rekening	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kegiatan Rinci Hibah JSMLP Bio CF	2024	2025
2.11.02.1.01.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	1.3.2.4. Pembuatan Dokumen Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	-	-
2.11.02.1.01.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	1.2.3.4 Melakukan studi carbon, manfaat non carbon, (penduduk asli/ Masyarakat Hukum Adat)	-	-
2.11.07.1.01.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan MHA yang terkait dengan PPLH	Kordinasi, Sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak kerarifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait RPPLH	1.3.2.2. Pengakuan MHA di Jambi	-	-
2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.2.1.1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional	210.000.000	210.000.000
2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.2.3.1. Peningkatan kapasitas Untuk menerapkan safeguard (pengaman kegiatan)	-	-
2.11.01.1.01.05	Program Penunjang Urusan pemertinah daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.2.1.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan	436.000.000	436.000.000
				Total Cost (Rp)	646.000.000	646.000.000

Rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Tabel 8 di atas tentu merupakan rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasinya tergantung dari beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya. Sehubungan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, harus memiliki indikator yang dapat diukur sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini telah mencantumkan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hasil pemetaan yang telah diverifikasi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pemetaan program kegiatan (Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023).

Program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi/tutupan lahan. Dari keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, terdapat 3 program/kegiatan/sub kegiatan yang dikategorikan responsif gender, yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan mengadakan pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung.

2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengadakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat baik perempuan ataupun laki-laki, dengan membentuk kelompok masyarakat berbasis masyarakat yang secara mandiri melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah di TPA/TPST Regional adalah mendorong terciptanya paradigma baru masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dalam pengelolaan persampahan yang memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai dan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Lingkungan Hidup merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2024 didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD dan Bank Dunia (Bio CF). Hasil perhitungan kebutuhan anggaran akan ditetapkan sesuai hasil pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, maka tersusunlah rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

TABEL 9
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)		
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			35.165.486.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.165.486.000	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			35.165.486.000	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64) poin	21.262.250.000	
	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	25 laporan/dokumen	1.208.000.000	
	2	11	01	1.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	435.000.000	APBD
	2	11	01	1.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD
	2	11	01	1.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD
	2	11	01	1.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD
	2	11	01	1.01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	APBD
	2	11	01	1.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	APBD
	2	11	01	1.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	661.000.000	APBD + BIOCF

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/dokumen	16.018.000.000	
	2	11	01	1.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	16.000.000.000	
	2	11	01	1.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000	
	2	11	01	1.02	00 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5.000.000	
	2	11	01	1.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8.000.000	
	2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian	175 orang	145.250.000	
	2	11	01	1.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	175 Paket	113.750.000	APBD
	2	11	01	1.05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16.500.000	APBD
	2	11	01	1.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	5.250.000	APBD
	2	11	01	1.05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	9.750.000	APBD
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.039.000.000	
	2	11	01	1.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.000.000	APBD
	2	11	01	1.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	200.000.000	APBD

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	75.000.000	APBD
	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	65.000.000	APBD
	2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.000.000	APBD
	2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	450.000.000	APBD
	2	11	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	25.000.000	APBD
	2	11	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000	APBD
	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	27 unit	995.000.000	
	2	11	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	360.000.000	APBD
	2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	300.000.000	APBD
	2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.000.000	APBD
	2	11	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	APBD
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	703.000.000	
	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	3.000.000	APBD
	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	400.000.000	APBD
	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	APBD
	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	120 unit	1.154.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	500.000.000	APBD
	2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	500.000.000	APBD
	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	70.000.000	APBD
	2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	84.000.000	APBD
2	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 Persen	3.900.000.000	
	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi yang disusun	2 dokumen	750.000.000	
	2	11	02	1.01	0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	0 Dokumen	0	APBD
	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen	750.000.000	APBD
	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	7 dokumen	3.150.000.000	
	2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD
	2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD
	2	11	02	1.02	0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 Dokumen	400.000.000	APBD
	2	11	02	1.02	0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	4 Dokumen	1.250.000.000	APBD

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara	61.39 78,49 74,89 84.62	4.738.236.000	
	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	4.255.236.000	
	2	11	03	1.01	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12 Dokumen	655.236.000	APBD
	2	11	03	1.01	00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	700.000.000	APBD
	2	11	03	1.01	00 15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	360 Dokumen	2.900.000.000	APBD
	2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	483.000.000	
	2	11	03	1.03	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	12 Dokumen	278.000.000	APBD
	2	11	03	1.03	00 10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	4 Kegiatan	205.000.000	APBD
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	100 Persen	450.000.000	
	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen	450.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000	APBD
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)	100 Persen	165.000.000	
	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	5 perusahaan	165.000.000	
	2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	APBD
	2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 Dokumen	165.000.000	APBD
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77 Persen	990.000.000	
	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 perusahaan	990.000.000,00	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	300.000.000	APBD
	2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	100.000.000	APBD
	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	590.000.000	APBD
						SUBKEGIATAN HILANG, SEMENTARA DIPETAKAN DI SUBKEGIATAN PADA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP (2.11.10.1.01.0003)				
7	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	86 Persen	610.000.000	
	2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah lokus MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui di Provinsi Jambi	36 lokus	250.000.000	
	2	11	07	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 Dokumen	250.000.000	APBD
	2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	36 kelembagaan	360.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2	11	07	1.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	36 Dokumen	360.000.000	APBD + BIOCF
8	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	70 Persen	550.000.000	
	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi	4 kali	550.000.000	
	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	22 Dokumen	450.000.000	APBD
	2	11	08	1.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	100 Orang	100.000.000	APBD
9	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase usulan penghargaan LH untuk masyarakat yang difasilitasi	100 Persen	750.000.000	
	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6 kategori	750.000.000	
	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 Entitas	750.000.000	
10	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif	100 Persen	1.350.000.000	
	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	17 kasus	1.350.000.000	
							Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	23 kasus		

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

	2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	17 Pengaduan	400.000.000	APBD
	2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	11 Perkara	200.000.000	APBD
	2	11	10	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	20 Perkara	450.000.000	APBD
	2	11	10	1.01	0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	17 Perkara	300.000.000	APBD
11	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	28%	400.000.000	
							Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	71%		
	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	205.866,67 ton/tahun	400.000.000	
							Jumlah penanganan sampah secara regional	522.019,05 ton/tahun		
	2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	13 Dokumen	200.000.000	APBD
	2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	0	APBD
	2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	2 Unit	100.000.000	APBD
	2	11	11	1.01	0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	522.019,05 Ton	100.000.000	APBD
	JUMLAH								35.165.486.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024

PROGRAM BIOCF

Nomor Rekening	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kegiatan Rinci Hibah JSLMP Bio CF	Pagu (Rp
2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengatahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.2.1.1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional	210.000.000
2.11.01.1.01.05	Program Penunjang Urusan pemertinah daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.2.1.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan	436.000.000
TOTAL					646.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja DLH Provinsi Jambi.

Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : Agustus 2023

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						35.165.486.000,00							35.658.786.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						35.165.486.000,00							35.658.786.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						35.165.486.000,00							35.658.786.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Predikat AKIP Perangkat Daerah</i>	-			B (64) poin	21.262.250.000,00						-	22.443.550.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun</i>	-			25 laporan/d okumen	1.208.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait	-	1.248.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	435.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				3 Dokumen	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				3 Dokumen	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	661.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait		661.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			35 laporan/dokumen	16.018.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan instansi terkait	-	17.018.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	16.000.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan instansi terkait		17.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan instansi terkait		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan instansi terkait		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	8.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi dan instansi terkait		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian	-			175 orang	145.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ASN di lingkup DLH Provinsi Jambi	-	150.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				175 Paket	113.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ASN di lingkup DLH Provinsi Jambi		113.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	16.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ASN di lingkup DLH Provinsi Jambi		19.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	5.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ASN di lingkup DLH Provinsi Jambi		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	9.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ASN di lingkup DLH Provinsi Jambi		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	1.039.000.000,00			Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi	-	1.054.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	65.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	450.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			27 unit	995.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi	-	1.040.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	360.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Paket	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			298 laporan	703.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi	-	753.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				250 Laporan	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	DLH Provinsi Jambi		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</i>	-			120 unit	1.154.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi	-	1.180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				21 Unit	500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				88 Unit	70.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	84.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barang Milik Daerah DLH Provinsi Jambi		105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	-			100 Persen	3.900.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi yang disusun	-			2 dokumen	750.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				2 Dokumen	750.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan				0 Dokuman	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	-			7 dokumen	3.150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	1.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS														
			Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan				1 Dokuman	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun</i>				4 Dokumen	1.250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara</i>	-			61.39 poin 78,49 poin 74,89 poin 84.62 poin	4.738.236.000,00						-	4.575.236.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	<i>Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan</i>	-			94 titik	4.255.236.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	4.055.236.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				12 Dokumen	655.236.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		655.236.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan</i>				6 Dokumen	700.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				360 Dokumen	2.900.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		2.900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	-			10 lokasi	483.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	520.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				12 Dokumen	278.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota				4 Kegiatan	205.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		205.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanakeragaman hayati Provinsi Jambi	-			100 Persen	450.000.000,00						-	500.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	-			1 dokumen	450.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	450.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)</i>	-			100 Persen	165.000.000,00						-	165.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi</i>	-			5 perusahaan	165.000.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</i>				22 Dokumen	165.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	-			77 Persen	990.000.000,00						-	1.115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-			70 perusahaan	990.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	1.115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				20 Dokumen	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		325.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				15 Orang	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				70 Badan Usaha	590.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		640.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	-			86 Persen	610.000.000,00						-	610.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah lokus MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui di Provinsi Jambi	-			36 lokus	250.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				11 Dokumen	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	-			36 kelembagaan	360.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				36 Dokumen	360.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	-			70 Persen	550.000.000,00						-	600.000.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi	-			4 kali	550.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				22 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase usulan penghargaan LH untuk masyarakat yang difasilitasi</i>	-			100 Persen	750.000.000,00						-	850.000.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan</i>	-			6 kategori	750.000.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				6 Entitas	750.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif</i>	-			100 Persen	1.350.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	<i>Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan</i>	-			23 kasus 17 kasus	1.350.000.000,00			-	4 - Peningk atan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	1.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				22 Perkara	350.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				20 Perkara	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi														
			Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi				6 Perkara	200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				17 Pengaduan	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	-			71 Persen 28 Persen	400.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah secara regional Jumlah pengurangan sampah secara regional	-			522019,05 ton/tahun 205866,67 ton/tahun	400.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik</i>				1 Unit	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional															
			<i>Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan</i>				522019,05 Ton	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi															
			<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan</i>				13 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	J U M L A H							35.165.486.000,00							35.658.786.000,00		



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 469 /KEP.GUB/DLH-1.2/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - b. menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Mei 2023



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 469 /KEP.GUB/DJH-1.2/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN
2023 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 3. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 5. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 6. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 7. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Kota Baru, Jambi – 36137

Telp. (0741) 40777, 445116, Fax. (0741) 40706

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NOMOR : 49/KEKAWH/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan proses kelanjutan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
PERTAMA**

- : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merupakan pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;

KEDUA

- : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 14 September 2023

KEPALA DINAS



Dr. H. VARIAL ADEI PUTRA, ST. MM.

Pemimpin Utama Madya

NIP. 196601052000121002